

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK**  
**(KLA) DI KABUPATEN SOPPENG**

**ILVA**  
**E011201036**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**ABSTRAK**

**Ilva (E011201036), Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Soppeng, - 103 Halaman + 6 Tabel + 13 Gambar, Dibimbing oleh Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si dan Adnan Nasution, S.Sos M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dan Mendeskripsikan Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Soppeng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan study dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun fokus penelitian berdasarkan pada 4 indikator dari George C. Edward III yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Soppeng jika analisis menggunakan 4 (empat) variabel Implementasi kebijakan menurut (Edward 1980) variabel komunikasi yang terjalin antara semua pihak yang terlibat telah berjalan dengan baik serta komunikasi dengan masyarakat juga telah berjalan dengan baik. Variabel Sumber daya dalam implementasi program ini yang meliputi pegawai, informasi, wewenang serta fasilitas dan anggaran yang masih kurang baik. Variabel disposisi atau sikap pegawai yang kurang baik karena penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta pemberian insentif yang tidak berjalan baik. Sedangkan struktur birokrasi yang belum berjalan baik karena belum adanya SOP hanya ada Juknis yang digunakan sebagai petunjuk dalam implementasi program ini namun sudah menerapkan fragmentasi untuk semua pihak yang terlibat.

**Kata Kunci : Implementasi, Program Kabupaten Layak Anak, Perlindungan Khusus**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**ABSTRACT**

**Ilva (E011201036), Implementation of the Child Friendly District Program in Soppeng Regency, - 103 Pages + 6 Tables + 13 Pictures, Supervised by Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si and Adnan Nasution, S.Sos M.Si**

This research aims to analyze and describe the implementation of the Child Friendly District Program in Soppeng Regency. The method used in this research is a qualitative descriptive method. Data collection techniques use observation, interviews and documentation studies related to the problems studied. The research focus is based on 4 indicators from George C. Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure.

The research results show that the implementation of a Child Friendly District in Soppeng Regency if the analysis uses 4 (four) policy implementation variables according to (Edward 1980) the communication variable between all parties involved has gone well and communication with the community has also gone well. Resource variables in implementing this program which include employees, information, authority, facilities and financial are still not good. The disposition variable or employee attitude is not good because the placement of employees is not in accordance with their educational background and the provision of incentives that do not work well. Meanwhile, the bureaucratic structure is not running well because there are no SOP, only technical guidelines are used as guidance in implementing this program but fragmentation has been implemented for all parties involved.

**Keywords: Implementation, Child Friendly District Program, Special Protection**



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilva

Nim : E011201036

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN SOPPENG**" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 7 Maret 2024

Yang menyatakan,



E011201036



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ilva  
Nim : E011201036  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Soppeng

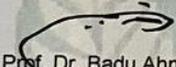
Telah diperiksa oleh pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan layak untuk ujian skripsi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

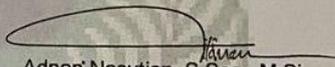
Makassar, 7 Maret 2024

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

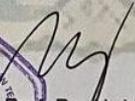
  
Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si  
NIP 196212311989031028

  
Adnan Nasution, S.Sos., M.Si  
NIP 19740707200511001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,



  
Prof. Dr. Alwi M.Si  
NIP 196310151989031006



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ilva  
Nim : E011201036  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Soppeng

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 7 Maret 2023

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Prof. Dr. Badu, M.Si (.....)  
Sekretaris Sidang : Adnan Nasution, S.Sos., M.Si (.....)  
Anggota : Dr. Nurdin Nara, M.Si (.....)  
: Drs. Nelman Edy, M.Si (.....)

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya serta segala berkat-Nya kepada penulis yang tiada henti sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "**Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA) di kabupaten Soppeng**" yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini masih terdapat kekurangan dalam penyelesaian dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Karase** dan Ibunda **Suharni** yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, terima kasih telah mencurahkan kasih sayang yang tak pernah putus, kesungguhan dalam memberikan dukungan moril serta tak kenal lelah dalam memanjatkan doa serta memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis selama menjalani proses pendidikan.

Selain itu, selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai bantuan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

2. **Prof. Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos, M.AP** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas hasanuddin.
5. **Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si** selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis meskipun ditengah kesibukannya. Penulis sangat berterima kasih dan mendoakan semoga beliau selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
6. **Adnan Nasution, S.Sos, M.Si** selaku penasehat akademik dan juga selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, masukan serta meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih dan mendoakan semoga beliau selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
7. **Dr. Nurdin Nara, M.Si dan Drs. Nelman Edy, M.Si** Selaku dewan penguji dalam sidang proposal dan skripsi penulis. Terima kasih atas segala masukan dan kritikan yang sangat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. **Para Dosen Departemen Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas hasanuddin**, terima kasih atas segala ilmu dan motivasi yang telah diberikan dan semoga apa yang telah penulis peroleh dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

9. Seluruh **Staff Departemen Ilmu Administrasi Publik (Ibu Rosmina, Pak A. Revi dan Pak Lili, dan Ibu Cia)** serta Staff lingkungan FISIP Universitas Hasanuddin tanpa terkecuali terima kasih atas segala bantuan yang tiada hentinya.
10. Seluruh **Pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng** yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. **Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Soppeng** yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada kedua orang tua (**Ayah Karase dan Ibu Suharni**) yang selalu memberikan nasihat dan dukungan tak terhingga kepada penulis sehingga bisa sampai pada titik ini.
13. Terima kasih kepada **kakak (Iqbal)** yang selalu memberikan bantuan dan dukungan tak terhingga sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
14. Teman seperjuangan penulis sejak maba hingga saat ini (**Rahma, Naqila, Uci, Nia**) terima kasih sudah jadi teman yang baik selama ini yang saling support, saling membantu, saling menyayangi dan terima kasih atas bimbingannya selama proses penyusunan skripsi ini.
15. Teman SMP yang sudah seperti saudara saya (**Manny, Naqila, Andi Uni**), terima kasih atau dukungan dan bantuannya, tetap saling support.
16. Terima kasih kepada **Arung Raya** yang sudah menjadi teman yang baik selalu memberikan dukungan, berbagi cerita, dan membantu penulis sampai pada titik ini.

17. Terima kasih kepada **HUMANIS FISIP UNHAS** yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman
18. **Teman-teman Ras Of Ipa Satu (RASIS)** sejak SMA yang baik dan selalu ada hingga saat ini. Terima kasih atas support, bantuan, hiburan ketika penulis sedang berada pada masa sulit.
19. Terima kasih kepada seluruh teman **KKNT Desa Wisata Kabupaten Toraja Utara** terkhusus **KKNT Lembang Tonga Riu ( Evina, Eby, Meylin, Caca, Bungin, Rey, dan Jeremy)** yang telah memberikan pengalaman dan kenangan yang terindah selama kurang lebih satu bulan mengabdikan di masyarakat.
20. Terima kasih kepada **Kepala Lembang Tonga Riu dan jajarannya** karena telah menerima kami dengan baik selama melakukan KKN kurang lebih satu bulan di masyarakat.
21. **Pena 2020** teman seperjuangan selama perkuliahan di kampus yang tidak dapat dituliskan satu persatu, Terima kasih atas segala bantuan, kerjasama, telah banyak berbagai ilmu selama proses perkuliahan di kampus. Penulis sangat bangga bergabung dan mengenal kalian.
22. Terima kasih kepada seluruh **Keluarga Dan Kerabat** penulis yang tiada hentinya mendokan dan memberikan yang terbaik selama penulis berada di bangku perkuliahan.
23. Terima kasih kepada **Semua Pihak** yang terlibat atau berkontribusi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga bantuan dan keikhlasannya mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

24. Dan yang terakhir, kepada **diri saya sendiri yaitu Ilva**, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah selalu berusaha menjadi yang terbaik walaupun terkadang apa yang diinginkan tidak tercapai, terima kasih sudah selalu mencoba bangkit ketika terluka, terima kasih sudah memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu, selalu bersyukur atas apa yang kamu miliki.

Makassar, 7 Februari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
II.1 Konsep Kebijakan Publik.....	9
II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	9
II.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	10
II.2.1 Pengertian Implementasi .....	10
II.2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.....	11
II.3 Konsep Program Kabupaten Layak Anak.....	28
II.3.1 Pengertian Program .....	28
II.3.2 Pengertian Kabupaten layak Anak.....	29
II.3.3 Tujuan Kabupaten Layak Anak.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
III.1 Jenis Penelitian .....	37
III.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	37
III.3 Fokus Penelitian .....	37
III.4 Sumber Data.....	41
III.4.1 Data Primer .....	41
III.4.2 Data Sekunder.....	42

III.5 Narasumber atau Informan .....	42
III.6 Teknik Pengumpulan Data .....	42
III.7 Teknik Analisa Data .....	43
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
IV.1 Kondisi Geograafis kabupaten Soppeng .....	46
IV.2 Visi dan Misi Kabupaten Soppeng.....	47
IV.3 Tugas Pokok dan fungsi.....	47
IV.4 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng.....	51
IV.5 Indikator Kabupaten Layak Anak.....	57
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
V.1 Perlindungan Khusus .....	63
V.2 Implementasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Soppeng .....	64
V.2.1 Komunikasi .....	66
V.2.2 Sumber Daya .....	70
V.2.3 Disposisi.....	82
V.2.4 Struktur Birokrasi.....	85
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
VI.1 Kesimpulan.....	88
VI.2 Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II.1</b> .....	<b>12</b>
<b>Gambar II.2</b> .....	<b>18</b>
<b>Gambar II.3</b> .....	<b>19</b>
<b>Gambar II.4</b> .....	<b>22</b>
<b>Gambar II.5</b> .....	<b>25</b>
<b>Gambar II.6</b> .....	<b>27</b>
<b>Gambar II.7</b> .....	<b>28</b>
<b>Gambar II.8</b> .....	<b>36</b>
<b>Gambar III.1</b> .....	<b>44</b>
<b>Gambar IV.1</b> .....	<b>46</b>
<b>Gambar IV.2</b> .....	<b>52</b>
<b>Gambar IV.3</b> .....	<b>60</b>
<b>Gambar IV.4</b> .....	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 .....	6
Tabel IV.1 .....	62
Tabel V.1 .....	64
Tabel V.2 .....	73
Tabel V.3 .....	87
Tabel V.4 .....	90

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan warga Negara secara bersama-sama dalam hukum pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, dan dilindungi oleh hukum, Negara dan pemerintahan dalam rangka menghormati dan melindungi martabat.

Dalam Hak Asasi Manusia, anak termasuk harus dilindungi, anak merupakan aset bangsa dalam pembangunan yang merupakan generasi penerus yang potensial. Pengertian anak dalam Undang-undang Perlindungan anak dikatakan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan”. Oleh karena itu bibit tunas bangsa harus mendapatkan prioritas yang utama dalam pembangunan.

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan upaya untuk melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi aktif sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penerapan perlindungan anak meliputi pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara demi mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang

potensial , tangguh, memiliki nasionalisme dan berkemauan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah berlaku selama 12 (dua belas) tahun diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberi efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban atau anak pelaku kejahatan.

Upaya untuk memberikan perlindungan anak, pemerintah membuat suatu kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak atau KLA. Kebijakan pengembangan Kabupaten layak anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hal-hak anak. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, lembaga masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. (*Kla.id*, 2023)

Kebijakan publik diciptakan memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk memecahkan masalah atau mencari solusi alternatif dari masalah yang menjadi isu bersama yang berkembang di masyarakat. Suatu kebijakan publik bukan hanya sebuah proses formulasi dan melegitimasi kebijakan saja, akan tetapi terkait dengan implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Sebaik apapun substansi

kebijakan publik yang dibuat jika tidak diimplementasikan dengan baik, maka kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada kepentingan masyarakat.

Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah kebijakan publik ditetapkan untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat strategis dalam proses kebijakan publik. Tahapan implementasi kebijakan akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu. Tahap implementasi kebijakan terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan adanya anggaran untuk membiayai pelaksanaan kebijakan tersebut. (Purwanto, 2015).

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Kampar” yang disusun oleh Aulio Bism Parneto dari Program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten Kampar belum berjalan dengan maksimal sepenuhnya. Hal ini dikarenakan terlibatnya seluruh sektor baik sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam kebijakan ini, sehingga pelatihan tentang Konveksi Hak Anak (KHA) menjadi lambat. Hal ini berdampak terhadap pemahaman tentang Kota Layak Anak dan kurangnya keterampilan dan kapasitas dari aparatur daerah yang menjalankan kebijakan ini. Tapi implementasi kebijakan ini di Kabupaten Kampar sudah cukup baik, ini bisa dibuktikan dengan predikat Madya yang diterima pada tahun 2021, dengan naik tingkatnya Kabupaten Kampar dari predikat Pratama ke predikat Madya menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Kampar meningkat.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan konsep teori dari Mazmania Sabatier yang mengatakan bahwa Implementasi kebijakan selalu berkaitan dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan, ataupun tingkat kemajemukan yang dihadapi masyarakat. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edward III yang mengatakan bahwa variabel Implementasi kebijakan terdiri dari empat, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Kampar, 2022).

*Jumanah, dkk. Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia* JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol.7 No. 1 tahun 2023. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Indonesia terbilang jauh lebih kompleks dibanding dengan pengembangan sebuah Kota Layak Anak di Negara lain. Hal ini disebabkan oleh struktur administrasi dan wilayah yang besar di Indonesia (Jumanah et al., 2023).

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang melaksanakan program Kabupaten Layak Anak (KLA). Penentuan untuk menjadi sebuah Kabupaten Layak Anak dapat dilihat dari 31 indikator tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang kemudian dikelompokkan menjadi 6 (enam) bagian, yaitu penguatan kelembagaan dan 5 klaster hak anak yang terdapat dalam peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 tahun 2011.

Bupati Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.

Kabupaten Soppeng juga telah meraih beberapa penghargaan sebagai Kota Layak Anak dan meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak dari peringkat Pratama ke Madya yang diterima pada 4 Agustus 2022 di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang diserahkan oleh Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan partisipasi Anak Rr. Endah Sri Rejeki, SE, M. IDEA. PH. D yang diterima oleh Kabid P2A Hj. Kartini, SKM. M. Kes mewakili kepala DP3AP2BK Kabupaten Soppeng.

Kabupaten Soppeng masih mengalami beberapa masalah kekerasan terhadap anak. Hal ini terdapat dalam salah satu indikator Kabupaten Layak Anak Kluster 5 yaitu perlindungan khusus, yaitu Klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus. Dalam klaster 5 perlindungan khusus terdapat 4 yang menjadi indikator, yaitu anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi, dan anak yang masuk dalam kelompok minoritas adat.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Soppeng. Dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam George C. Edward III (1980:148) sebagai grand theory dalam penelitian yang akan dilakukan. Teori ini digunakan karena adanya kesesuaian dengan fenomena yang didapatkan, dengan tujuan mendapatkan solusi dari permasalahan penelitian mengenai Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Soppeng serta teori ini menjelaskan beberapa variabel yang sesuai dengan topik penelitian.

Adapun alasan penulis yang terkhusus dalam penelitian implementasi kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Soppeng karena Kabupaten Soppeng merupakan salah satu dari Kabupaten/Kota se-Indonesia yang meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Peringkat Madya pada Tahun 2022. Namun, Berdasarkan data yang didapatkan pada pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Tahun 2021-2023 kasus Kekerasan pada anak masih meningkat, sedangkan tujuan Pemerintah membuat program KLA ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak . Sehingga dengan masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Soppeng

**Tabel I.1**

**Data Jumlah Kekerasan Anak di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak
1	2021	21
2	2022	29
3	2023	40
	Total	90

*Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Soppeng*

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah kasus kekerasan anak di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan. Dari data di atas, kita dapat melihat bahwa implementasi pemerintah dalam kebijakannya belum berjalan dengan baik. Sehingga hal ini perlu perhatian khusus oleh pemerintah bahwa perlu diperbaiki pengimplementasian program Kabupaten layak Anak di Kabupaten Soppeng.

Oleh karena itu peneliti mengambil judul ***“Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Soppeng”***

## **I.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka peneliti mengemukakan rumusan sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Soppeng?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

Menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Soppeng.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

### 1. Teoritis :

- 1) Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dengan melakukan uji komperasi terhadap penerapannya secara nyata di masyarakat.
- 2) Memberikan pengetahuan yang lebih tentang Ilmu Administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Program Kabupaten layak Anak di Kabupaten Soppeng.

### 2. Praktis :

- 1) Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan masalah dalam Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Soppeng.

- 2) Manfaat yang didapat oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng ialah mengetahui Implementasi Kabupaten Layak Anak di daerahnya.
- 3) Manfaat bagi masyarakat adalah membangun kesadaran masyarakat untuk peduli dalam memenuhi hak-hak anak sehingga Kabupaten Layak Anak dapat terwujud di Kabupaten Soppeng.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1 Konsep Kebijakan Publik**

##### **II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Melalui Laswell dan Kaplan dalam (Ravyansah, 2022) bahwa kebijakan dalam pemerintah sebagai sarana untuk mencapai tujuan serta program yang memproyeksikan terkait dengan tujuan, nilai, serta praktik ( *a projected program of goals, values, and practice*). Bagi Fredrich yaitu suatu kebijakan yang paling pokok terdapat tujuan (*goals*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*).

Kebijakan sendiri merupakan suatu keputusan mengenai sejumlah atau rangkaian pilihan yang saling berkaitan dan ditujukan untuk mencapai tujuan. Lingkungan kebijakan mencakup kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa mendasar yang menimbulkan suatu “masalah” kebijakan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan kebijakan itu sendiri (Tachjan, 2006).

Beberapa penulis besar diantaranya William Dunn, Lee Friedman, dan Charless Jones memakai sebutan *public policy* serta *public policy analysis* tidak ada suatu perbedaan. Sebutan kebijakan yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris ialah “*policy*”. Adapun dikaitkan pada keputusan pemerintah dengan alasan memiliki kewenangan, kekuasaan, dan bertanggung jawab untuk mengarahkan masyarakat agar bisa tercapainya tujuan kepentingan umum. Hal ini selaras dengan definisi publik dengan istilah bahasa Inggris “*Public*” melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “umum, masyarakat, orang banyak”.

Menurut Dye (1995) dalam (Ravyansah, 2022) bahwa *public policy is whatever governments choose to do or not to do*. Kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dengan tindakan tersebut adanya sisi orientasi atau tujuan untuk adanya tuntutan publik serta dukungan publik. Konteks tersebut dapat menjadikan kemudahan stakeholders yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan publik ini.

## **II.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

### **II.2.1 Pengertian Implementasi**

Menurut kamus (Merriam-Webster, 2023) pengertian implementasi adalah:

*“Implementation is an act or instance of implementing something : the process of making something active or effective.”*

Implementasi merupakan suatu tindakan atau contoh penerapan sesuatu : proses menjadikan sesuatu menjadi aktif atau efektif. Implementasi juga bertujuan menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu.

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai implementasi kebijakan diantaranya, menurut Grindle implementasi adalah proses umum dari tindakan administratif. Apabila tujuan dan sasaran telah ditentukan, program kegiatan telah disusun, dan sumber daya telah siap dan disalurkan untuk mencapai tujuan ini, maka implementasi akan dimulai.

Sehubungan dengan Implementasi, Pressman dan Wildavsky (Pressman, 1973) mengemukakan bahwa,

*“Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete”.*

Maksudnya, membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.

Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ini

menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Menurut Lengkai, kebijakan diturunkan dalam bentuk program-program, yang kemudian dioperasionalkan sebagai proyek-proyek yang wujudnya adalah kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Program, proyek dan kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan, hasilnya berupa “produk” yang merupakan output dan outcomes dari suatu kebijakan. (Sutmasa, 2021)

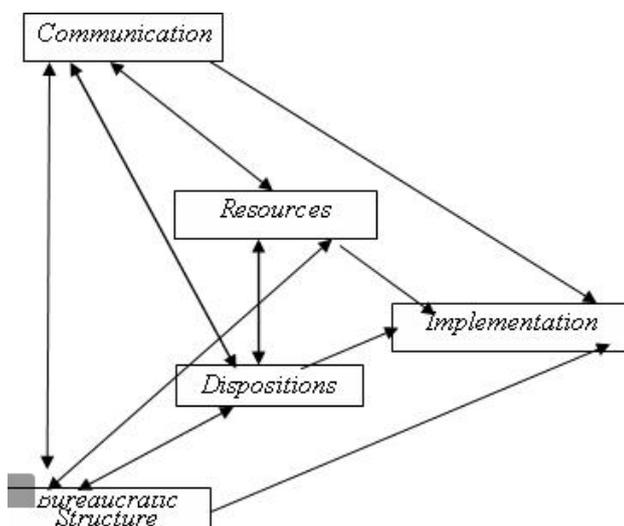
Dari beberapa pengertian implementasi kebijakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan guna untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu.

## **II.2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**

### **1. Model George C. Edward III**

George C. Edward III mengemukakan terdapat 4 (empat) variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan yang saling berhubungan satu sama lain yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model tersebut dapat disajikan dalam gambar di bawah ini :

Gambar II.1



Sumber : George Edward III, 1980 : 148

#### 1) Communication (Komunikasi)

*“The first requirement for effective policy implementation is that those who are to implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions and implementation orders must be transmitted to the appropriate personnel before they can be followed. Implementation directives must not only be received, but they must also be clear. If they are not, implementors will be confused about what they should do, and they will have discretion to impose their own views on the implementations of policies, views that may be different from those of their superiors.”*

Hal pertama yang harus dilakukan agar penerapan kebijakan efektif yaitu mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, keputusan kebijakan dan perintah pelaksanaan harus disampaikan kepada yang berwenang. Komunikasi harus akurat dan dapat dipahami oleh para pelaksana/implementor. Jika tidak, pelaksana/implementor akan bingung tentang apa yang harus mereka lakukan dan mereka akan memiliki kebijaksanaan untuk memaksakan pandangan mereka sendiri tentang implementasi kebijakan yang mungkin berbeda dengan atasan mereka. Keputusan yang bertentangan dapat membingungkan dan menggagalkan

staf administrasi untuk menerapkan kebijakan yang efektif. Untuk lebih jelasnya dalam komunikasi terdapat 3 (tiga) indikator untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

a. Transmisi (Transmission)

*“Transmission or delivery of policy information to policy implementers is conveyed well so that success of implementation is higher.”*

Terdapat banyak hambatan dalam penerapan implementasi yaitu adanya ketidaksepakatan pelaksana. Ketidaksepakatan atas kebijakan dapat menyebabkan penyumbatan langsung atau distorsi komunikasi. Dari hal tersebut, transmisi atau penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana kebijakan disampaikan dengan baik agar tingkat keberhasilan implementasi lebih tinggi.

b. Kejelasan

*“If policies are to be implemented as those who enacted them intended, implementation directives must not only be received, but must also be clear. Often the instructions transmitted to implementors are vague and do not specify when or how a program is to be carried out.”*

Arahan implementasi tidak hanya harus diterima, tetapi juga harus jelas. Kurangnya kejelasan dalam penyampaian arahan dapat memberikan makna baru yang bertentangan dengan tujuan awal. Pelaksana membutuhkan kejelasan agar dapat melaksanakan program dengan baik.

c. Konsistensi

*“Implementation orders must be consistent as well as clear if policy implementation is to be effective. Transmitting clear but contradictory instructions will hardly make it easier for operational personnel to expedite implementation.”*

Dalam pelaksanaan komunikasi membutuhkan arahan yang konsisten dan jelas agar tidak membingungkan para pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan.

## 2) Resources (Sumber daya)

*“Implementation orders may be accurately transmitted clear and consistent but if implementors lack the resource necessary to carry out policies, implementations is likely to be ineffective. Resource can be critical factor in implementing public policy important research include staff with efficient size and with the proper skills to carry out their assignment and the proper information, authority and facilities necessary to translate proposal on paper into functional public service.”*

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

Walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, jika implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Terdapat beberapa indikator dalam variabel sumberdaya ini, yaitu ketersediaan sumberdaya, informasi, kewenangan serta fasilitas yang dijelaskan seperti berikut:

### a. Staff (Staf)

*“Probably the most essential resource in implementing policy is staff. In an era in which “big government” is under attack from all directions, it may seem surprising to learn that a principal source or implementation failure is inadequate staff.”*

Sumberdaya yang paling penting dalam menerapkan kebijakan adalah staf.

Namun, staf harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya untuk melaksanakan implementasi kebijakan.

### b. Information (Informasi)

*“Information is a second essential in policy implementation. This information comes in two forms. The first is information regarding how to carry out a policy. Implementors need to know what to do when they are given directives to act. The second form essential information is data on the compliance of others with governmental rules and regulations.”*

Terdapat 2 (dua) jenis informasi dalam implementasi kebijakan yaitu, pertama informasi tentang bagaimana melaksanakan kebijakan dan kedua informasi tentang kepatuhan seseorang dengan aturan dan peraturan pemerintah. Para

pelaksana harus mematuhi hukum serta mengetahui siapa yang terlibat di dalamnya.

c. Authority (Kewenangan)

*“Authority varies from program to program and comes in many different forms: the right to issue subpoenas; take cases to court; issue orders to other officials; withdraw funds from a program; provide funds; staff and technical assistance to lower level government jurisdictions; issue checks to citizens; purchase goods and services; or levu taxes.”*

Kewenangan merupakan hak atau legitimasi yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan publik. Kewenangan ini dapat berbentuk mulai dari memberikan sehingga membatasi sesuatu. Para pelaksana harus memiliki legitimasi dalam pengimplementasian kebijakan agar dapat dianggap oleh masyarakat.

d. Facilities (Fasilitas)

*“Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementator may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary buildings, equipment, supplies, and even green space implementation won't succeed.”*

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam proses implementasi kebijakan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung kinerja para pelaksana dalam implementasi kebijakan.

e. Financial (Anggaran)

*“New town studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*

Menurut Widodo (2010) dalam (Aristin & Azizah, 2018) terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.

### 3) Dispositions (Disposisi)

*“A third factor with important consequences for implementation: the dispositions of implementors. If implementors are well disposed toward particular policy, they are more likely to carry it out as the original decisionmakers intended. But when implementor attitudes or perspectives differ from the decisionmakers the process of implementing a policy becomes infinitely more complicated. Because implementors generally have discretion, their attitudes toward policies may be obstacles to effective policy implementation.”*

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang telah direncanakan oleh pembuat kebijakan. Namun, jika sikap pelaksana atau perspektif berbeda dari pembuat kebijakan maka mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan.

#### a. *Staffing the bureaucracy* (Staf birokrasi)

*“Implementors dispositions pose serious obstacles to policy implementation, but if existing personnel do not implement policies the way top officials desire. Transferring personnel to other positions within the civil service is one technique of dealing with recalcitrant implementors, but the inherent negativeness of such an approach and the ability of bureaucrats to fight transfers successfully limits its utility.”*

Disposisi pelaksana menimbulkan hambatan serius bagi implementasi kebijakan. Maka dari hal tersebut, dalam memilih dan mengangkat pelaksana kebijakan harus berkomitmen pada kebijakan yang telah ditetapkan.

#### b. *Incentives* (Insentif)

*“Changing the personnel in government bureaucracies is difficult, and it does not ensure that the implementation process will proceed smoothly. Another potential technique to deal with the problem of implementors dispositions is to alter the dispositions of existing implementors through the manipulation of incentives. Since people generally act their own interest, the manipulation of incentives by high level policymakers may influence their actions. Increasing the benefits or costs of a particular behavior may make implementors more or less likely to choose it as a means of advancing their personal, organizational, or substantive policy interest.”*

Mengubah pribadi dalam birokrasi pemerintah itu tidak memastikan bahwa proses implementasi kebijakan akan berjalan lancar. Orang-orang pada umumnya bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan mereka. Masalah yang penting dalam penggunaan insentif adalah mengukur kinerja. Jika dilakukan tanpa kepekaan terhadap beragam tujuan kebijakan, kesulitan tugas yang dilakukan, maka akan terjadi kekacauan dalam proses implementasi kebijakan.

#### 4) *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

*“Policy implementors may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve.”*

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki sumberdaya yang cukup untuk melakukannya. Tetapi mereka mungkin terhambat dalam implementasi oleh struktur organisasi di tempat mereka.

##### a. *Standard Operating Procedures* (SOP)

*“Standard operating procedures are routines that enable public officials to make numerous everyday decisions. Although designed to make implementing policies easier at least in theory SOP can function as obstacles to action. Top officials have had many a plan thwarted by standard government practices.”*

Biasanya SOP diperlukan karena kurangnya sumberdaya. Pejabat biasanya kekurangan staf untuk meneliti masalah secara menyeluruh, namun mereka harus dapat membuat keputusan dengan cepat. Dengan demikian, situasi yang kompleks harus disederhanakan. Dengan adanya SOP dapat menghemat waktu serta menciptakan keseragaman ke organisasi.

b. *Fragmentation* (Fragmentasi)

*“Fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units.”*

Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab untuk kebijakan diantara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor kebijakan yang terlibat maka semakin beragam keputusan yang diambil yang dapat mengakibatkan kegagalan implementasi. Sumberdaya dan otoritas diperlukan untuk mengatasi masalah secara komprehensif yang sering didistribusikan di beberapa unit birokrasi (Edwards III, 1980).

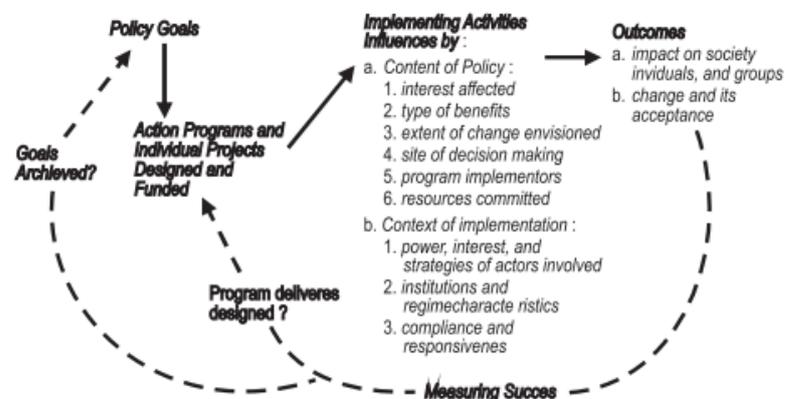
## 2. Model Merilee S. Grindle

Dalam bukunya, (Grindle, 1980) menjelaskan bahwa :

*“Implementing activities outcomes such as impact and society, individuals, and groups; change and its acceptance influenced by content of policy and context of implementation”*

Maksudnya bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Berikut merupakan gambar model kebijakan menurut Merilee S. Grindle :

**Gambar II.2**



Sumber : Merilee S. Grindle, 1980 : 11.

Adapun Isi kebijakannya yang mencakup hal-hal berikut :

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang dihasilkan
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
- 5) Siapa pelaksana program
- 6) Sumber daya dikerahkan

Sedangkan Lingkungan Kebijakan (*content of implementation*)

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap

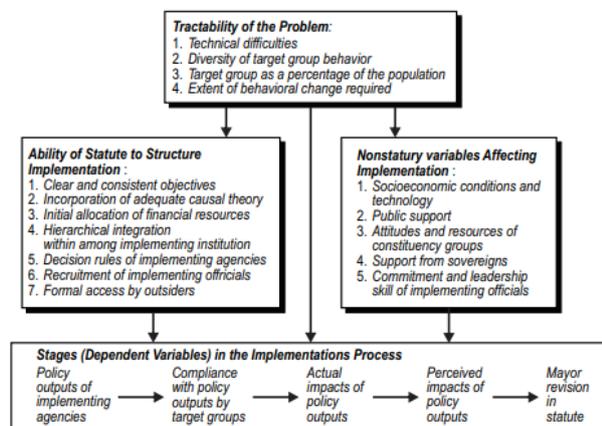
### 3. Model Mazmanian dan Sabatier

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam (Mazmanian, 1945) :

*“Implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which an also take the from of important executives orders or court decisions. In our view, the crucial role of implementation analysis is the identification of the variables which affect the achievement of legal objectives throughout this entire process.”*

Model tersebut dapat disajikan dalam gambar berikut :

**Gambar II.3**



Sumber : Mazmanian and Paul A.Sabatier, 1945

Ketiga kelompok variabel tersebut yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

- 1) Karakteristik dari masalah (*Tractability of the problems*), indikatornya:
  - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan (*technical difficulties*)
  - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran (*diversity of target group behavior*)
  - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi (*target group as a percentage of the population*)
  - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan (*extent of behavioral change required*)
- 2) Karakteristik kebijakan/Undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya:
  - a. Kejelasan isi kebijakan (*clear and consistent objectives*)
  - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis (*incorporation of adequate causal theory*)
  - c. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut (*initial allocation of financial resources*)
  - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana (*hierarchical integration within and among implementing institutions*)
  - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana (*decision rules of implementing agencies*)
  - f. Rekrutmen staf pelaksana (*recruitment of implementing officials*)

- g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan (*formal access by outsiders*)
- 3) Variabel lingkungan (*nonstutory variables affecting implementation*), indikatornya:
- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi (*socioeconomic conditions and technology*)
  - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan (*public support*)
  - c. Sikap dari kelompok pemilih (*attitudes and resources of constituency groups*)
  - d. Dukungan dari kedaulatan (*support from sovereigns*)
  - e. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor (*commitment and leadership skill of implemting officials*)

#### **4. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn**

Dalam (Mulyadi, 2015) menjelaskan bahwa :

Terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

##### 1) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

##### 2) Sumberdaya

Kebijakan perlu didukung oleh sumberdaya, baik itu sumberdaya manusia atau sumberdaya non manusia.

##### 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program perlu didukung dan dikordinasikan dengan instansi lain untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan.

#### 4) Karakteristik agen pelaksana

Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk di dalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

#### 5) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

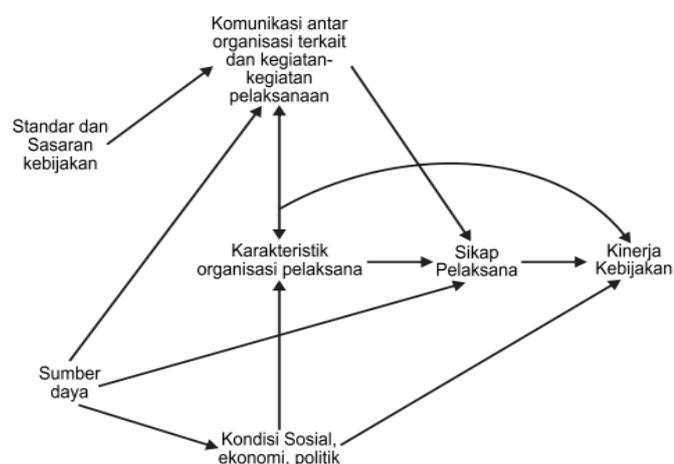
#### 6) Disposisi implementor

Dalam disposisi implementor terdapat tiga hal penting, yaitu:

- Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
- Kognisi adalah pemahamannya terhadap kebijakan
- Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor

Model tersebut dapat disajikan pada gambar di bawah ini :

**Gambar II.4**



Sumber : tacjhan, 2006 : 40

## 5. Model Hogwood dan Gunn

Dalam bukunya (Mulyadi, 2015) menyatakan bahwa:

Untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu:

- 1) Berkenan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
- 2) Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu. Gagasan ini sangat bijaksana karena berkenan dengan fisibilitas implementasi kebijakan.
- 3) Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas oleh karena itu implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan baik dalam konteks sumberdaya maupun sumber-aktor. Salah satu contoh adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak akan berjalan efektif jika kerjasama antar departemen dan antar daerah tidak terbangun secara efektif.
- 4) Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kasual yang andal. Jadi prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi. Dalam metodologi dapat disederhanakan menjadi apakah jika X dilakukan akan terjadi Y.
- 5) Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya semakin sedikit hubungan “sebab-akibat” semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. Sebuah otomatis menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.

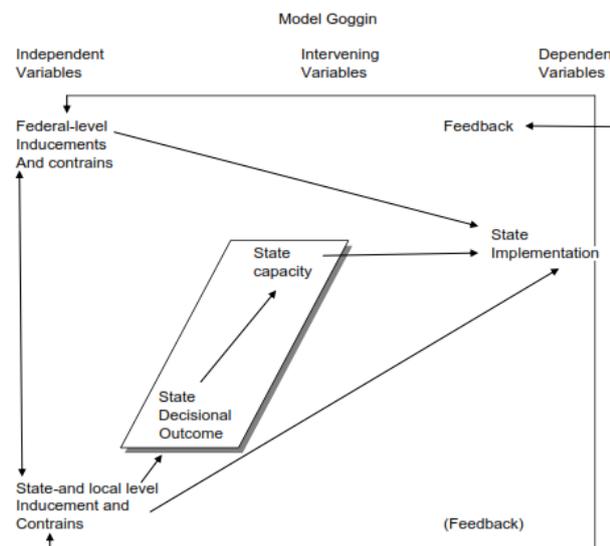
- 6) Apakah hubungan saling kebergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling kebergantungan tinggi, implementasi tidak akan berjalan secara efektif apalagi jika hubungannya adalah hubungan ketergantungan. Sebagai contoh implementasi kebijakan pengurus-utamaan gender banyak menemui kendala karena kantor menteri Negara pemberdayaan perempuan bergantung dalam intensitas tinggi kepada seluruh departemen dan LPND serta kepala daerah-daerah.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Sudah dapat disepakati bahwa mereka yang ada dalam perahu yang sama akan ke sebuah tujuan yang sama. Sebuah perahu dengan penumpang yang berbeda-beda tujuan dan pemimpin yang tidak mampu memimpin adalah perahu yang tidak akan pernah bisa beranjak jauh dari tempat semula.
- 8) Tugas-tugas yang telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan.
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi dan koordinasi adalah asal muasal dari kerjasama tim dan terbentuknya sinergi.
- 10) Bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna, kekuasaan adalah syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas dari kekuasaan kebijakan akan tetap berupa kebijakan tanpa ada dampak bagi target kebijakan.

## **6. Model Goggin, Bowman, dan Lester**

Dalam bukunya (Mulyadi, 2015) *Malcolm Goggin, Ann browman, dan Janse Lester* mengembangkan apa yang disebutnya sebagai "*communication*

*model*” untuk implementasi kebijakan, yang disebutnya sebagai “Generasi Ketiga Model Implementasi Kebijakan” (1990). *Goggin*, dkk. Bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan-pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen, dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan. Modelnya digambarkan sebagai berikut :

**Gambar II. 5**



Sumber : *Kasmad, 2013 : 53*

## 7. Model Elmore, dkk

Dalam buku (Mulyadi, 2015) Lalu, model yang disusun *Richard Elmore* (1979), *Michael Lipsky* (1971), dan Benny Hjern & David O’Porter (1981). Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di dataran rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang

menjadi target atau kliennya, sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksanaanya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).

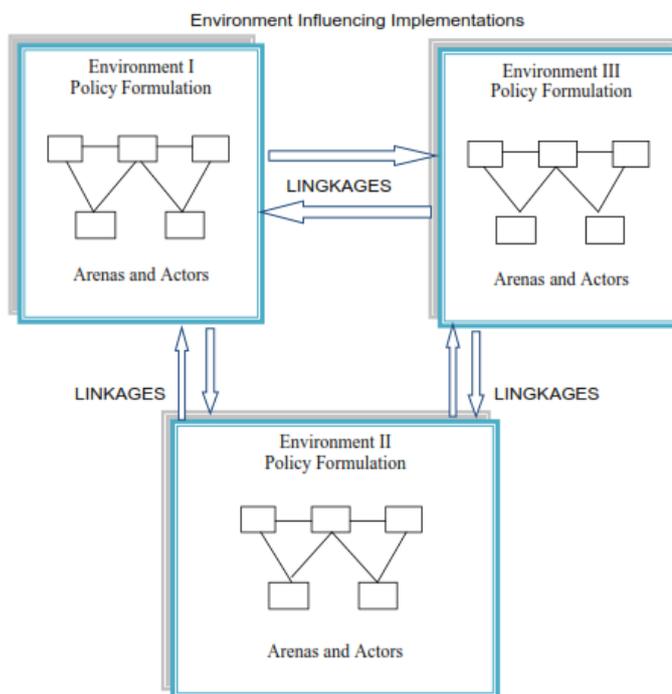
## **8. Model Nakamura & Smallwood**

Nakamura dan Amallwood (Mulyadi, 2015) mengemukakan bahwa proses kebijakan adalah proses yang rumit, khususnya pada implementasi. Dikatakan demikian:

Proses kebijakan merupakan proses yang kompleks. Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses ini, yang tidak bisa dipisahkan dan terlepas dari bagian yang lainnya. Implementasi kebijakan tanpa memperhatikan bagian-bagian lainnya sama saja dengan menilai hasil pemilihan tanpa melihat karakteristik kandidat atau komposisi lektorat. Pembahasannya pasti akan sangat dangkal. Oleh karenanya, perlu pemahaman konseptual mengenai proses kebijakan secara menyeluruh. Salah satu cara untuk mempelajari implementasi kebijakan yaitu dengan melihat proses kebijakan sebagai sebuah sistem. Sebuah sistem ditandai oleh seperangkat unsur-unsur yang saling berkaitan, yang masing-masing berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat tinjauan sistem terletak pada simplifikasi proses kebijakan sebagai seperangkat unsur dan keterkaitan unsur utama pada proses kebijakan dapat dilihat sebagai seperangkat lingkungan fungsional di mana aspek proses yang beragam muncul.

Model pengaruh lingkungan terhadap implementasi kebijakan digambarkan sebagai berikut :

**Gambar II.6**

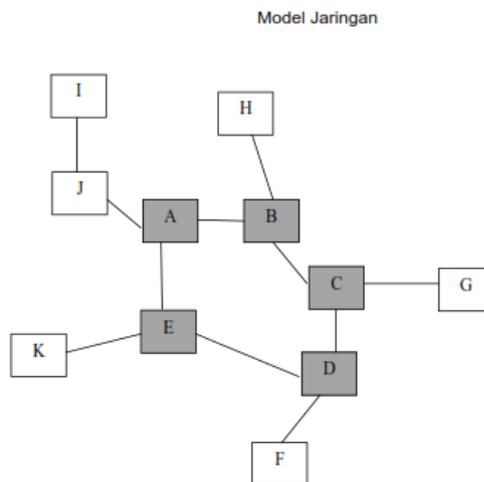


Sumber : Kasmad, 2013 : 61

## 9. Model Jaringan

Dalam (Mulyadi, 2015) model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah *complex of interaction processes* di antara sejumlah besar aktor yang berada dalam suatu jaringan (*network*) aktor-aktor yang independen. Interaksi di antara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting di dalamnya. Pada gambar berikut, kita dapat melihat pada aktor A,B,C,D,E

**Gambar II.7**



Sumber : Kasmad, 2013 : 62

## II.3 Konsep Program Kabupaten Layak Anak

### II.3.1 Pengertian Program

Terry (1977 : 253) mengemukakan bahwa :

*“ A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and established a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objectives. The makeup of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards, and budgets”.*

Maksudnya, bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, prosedur, metode, kstandard, dan budget. (Tachjan, 2006)

Menurut Hasibuan dalam bukunya (Hasibuan, 2009) program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena didalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Menurut Bintoro Tjokroadmidjojo dalam (Pratama & Fauzi, 2018) program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tujuan yang terdefinisi dengan baik
- b. Memilih peralatan terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
- c. Kerangka kerja kebijakan terpadu atau proyek yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan program seefisien mungkin
- d. Evaluasi berdasarkan estimasi biaya dan manfaat yang dihasilkan oleh program
- e. Hubungan dalam kegiatan lain yang terkait dengan upaya lain program pembangunan
- f. Berbagai upaya pengelolaan, seperti penyediaan tenaga pembiayaan dan lain-lain untuk menjalankan program
- g. Berbagai upaya pengelolaan, seperti penyediaan tenaga pembiayaan dan lain-lain untuk menjalankan program

### **II.3.2 Pengertian Kabupaten layak Anak**

Menurut Lenny Rosalin dalam (Aji, 2021), menyebutkan bahwa Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Kebijakan mengenai Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu sistem dalam tata kelola pembangunan dengan menggunakan landasan hak anak melalui pengintegrasian antara komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan baik dalam segi kebijakan, program, maupun kegiatannya untuk menjamin pemenuhan hak anak (Pujianti, 2022).

Kota layak anak adalah kota yang mendorong anak tumbuh secara positif dan bertanggung jawab. Dengan adanya Kota Layak Anak, maka anak-anak akan aman dan terlindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Seorang anak di masa depan akan memiliki akses terhadap layanan penting, pendidikan berkualitas dan akses terhadap ruang hijau (Elkhouly, 2022).

Kabupaten Layak Anak idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator kelembagaan dan 5 klaster hak anak.

Klaster hak anak terdiri dari 5 (lima) klaster, yaitu :

1. Klaster hak sipil dan kebebasan

Dalam klaster hak sipil dan kebebasan, setiap anak berhak mendapatkan nama dan pencatatan dalam administrasi kependudukan seperti akta lahir. Selain itu, klaster ini juga mencakup partisipasi anak dan suara anak perlu didengar dalam setiap pengambilan keputusan.

2. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

Di sini berbicara soal peran dan tanggung jawab orang tua. Peran Negara adalah mendukung orang tua dalam pengasuhan. Terkait dengan pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang diperuntukkan bagi anak yang kehilangan

orang tua dengan dukungan Negara. Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak anak pada klaster ini, dibutuhkan penguatan kapasitas orang tua sebagai penanggung jawab pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Untuk mendukung ini, Negara idealnya menyediakan fasilitas bagi orang tua dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Termasuk membangun persepsi yang sama di masyarakat bahwa pengasuhan merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu.

### 3. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan

Klaster ini meliputi akses ke layanan kesehatan, jaminan sosial, standar kehidupan yang layak, dan dukungan orang tua yang bekerja.

### 4. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

Meliputi keikutsertaan dalam agama, partisipasi dalam kegiatan seni budaya, pemenuhan pendidikan dan penerapan tujuan pendidikan yang universal dan inklusif.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam klaster ini adalah capaian tentang wajib belajar 12 tahun, jumlah sekolah ramah anak, dan tersedianya fasilitas kegiatan budaya, kreativitas dan ruang rekreatif yang ramah anak.

### 5. Klaster perlindungan khusus

Ini mencakup pemenuhan hak-hak Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Termasuk hak anak penyandang berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan anak pada kelompok marjinal. Klaster ini mencakup juga hak anak pada situasi bencana, anak yang dilacurkan, anak korban kekerasan, dan lain-lain.

Dalam klaster lima Perlindungan khusus terdapat empat poin yang menjadi indikator, yaitu:

#### 1. Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya)

#### 2. Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restorative dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban sistem sosial yang lebih besar.

#### 3. Anak dalam situasi eksploitasi

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh.

#### 4. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa, dan kepercayaannya.

Dari kelima klaster Kabupaten Layak Anak tersebut, peneliti hanya berfokus pada klaster perlindungan khusus sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Soppeng saat ini.

Di Kabupaten Soppeng terdapat delapan kecamatan dan delapan tersebut kecamatan yang merupakan tempat pelaksanaan program tersebut, antara lain

Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau. Dalam kecamatan tersebut telah telah memiliki prasyarat pelaksanaan program tersebut sesuai dengan indikator pelaksanaan Kabupaten Layak Anak.

Di Kabupaten Soppeng telah dilaksanakan berbagai kegiatan pengembangan Kabupaten Layak Anak, seperti kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sensitifitas Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan bagi klien secara optimal. Selain itu juga untuk meningkatkan pengetahuan peserta dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas berbasis kesetaraan gender dan hak anak.

### **II.3.3 Tujuan Kabupaten Layak Anak**

Tujuan Kabupaten Layak anak adalah mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Beberapa tujuan utama dari konsep kota layak anak diantara lain :

- a. Menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. Mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orangtua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya

mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;

- c. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak; dan
- d. Mengimplementasikan Kabupaten layak Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kabupaten Layak Anak sebagaimana tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **II.4 Kerangka Pikir**

Dalam pengimplementasian suatu kebijakan, terdapat beberapa model yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Sesuai dengan model yang telah dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka sebelumnya, dalam penelitian ini akan menggunakan model implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III. Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III menjelaskan bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

##### **1. Variabel Komunikasi**

Dalam keberhasilan implementasi kebijakan pelaksana harus tahu apa yang harus dilakukan. Dalam implememntasi kebijakan, terdapat beberapa variabel komunikasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu dimensi penyampaian, ketidakjelasan dalam berkomunikasi, konsistensi komunikasi, dan kepentingan kelompok sasaran. Komunikasi yang baik antara pelaksana dan atasan sangat penting untuk mencapai suatu tujuan kebijakan tersebut.

## 2. Variabel Sumberdaya

Selain komunikasi yang jelas dan konsisten, ketersediaan personel dengan keterampilan yang memadai juga menjadi faktor penting keberhasilan implementasi. Semakin tinggi potensi sumber daya yang dimiliki maka akan semakin baik proses implementasi kebijakan berjalan.

## 3. Variabel Disposisi

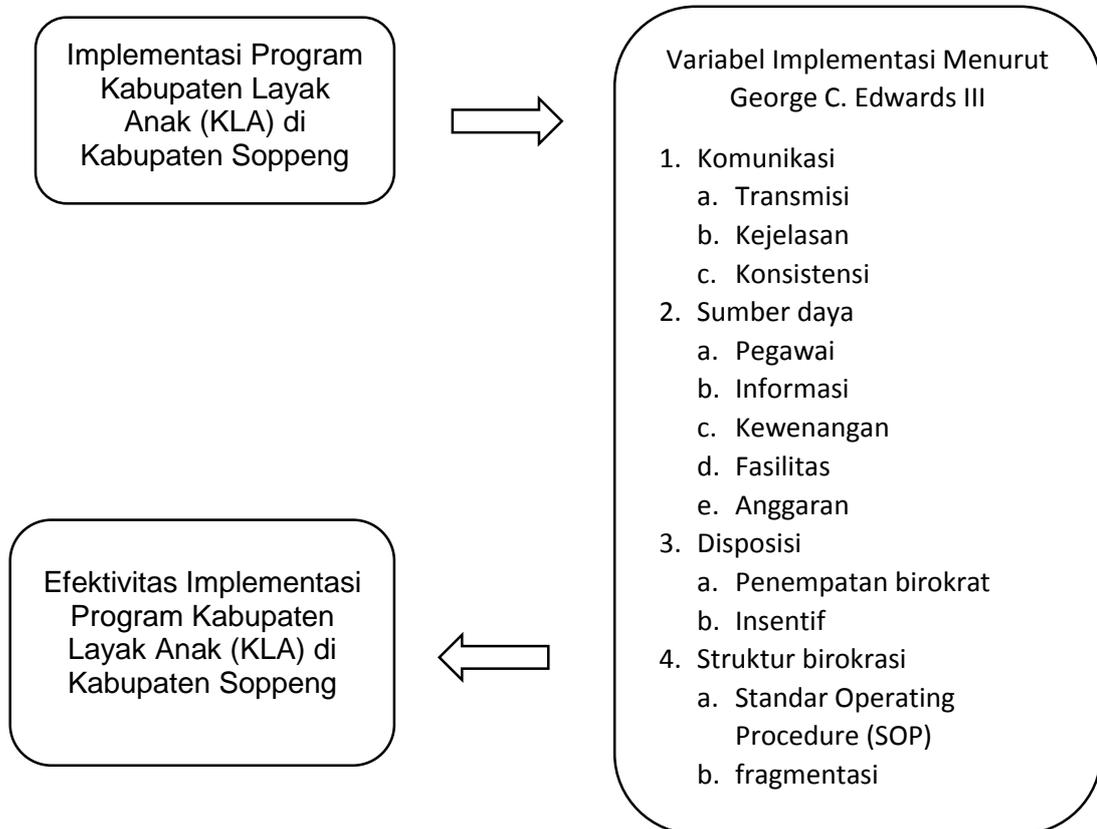
Disposisi dalam konteks implementasi kebijakan merujuk pada sikap atau kecenderungan para pelaksana kebijakan dalam menanggapi situasi tertentu. Disposisi yang baik pada para pelaksana kebijakan dapat membantu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Terdapat dua indikator dalam disposisi yaitu penempatan birokrat dan pemberian insentif.

## 4. Variabel Struktur Birokrasi

Variabel struktur birokrasi merupakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi yang baik dapat menjadikan kebijakan dapat berjalan dengan baik, sedangkan struktur birokrasi yang buruk dapat menghambat jalannya kebijakan. Terdapat dua indikator dalam struktur birokrasi yaitu Standar Operating Prosedur (SOP) dan fragmentasi.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah:

**Gambar II.8 Bagan Kerangka Pikir**



*Sumber : Peneliti, 2023*